

# LAPORAN

## STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2008



Diterbitkan: Desember 2008



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA  
PROVINSI PAPUA**

## KATA PENGANTAR

Hanya Puji dan Syukur yang patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan bimbingan dan pertolongan Tuhan jualah sehingga penyusunan Satus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tolikara tahun 2008 dapat diselesaikan penyusunannya.

Disadari bahwa dalam penyusunan SLHD ini masih terdapat banyak kekurangan secara khusus yang terkait dengan data-data lingkungan hal mana disebabkan karena sarana dan prasarana penunjang (peralatan uji sampel) masih sangat terbatas serta sumber daya manusianya.

Dilain pihak bahwa Kabupaten Tolikara adalah merupakan kabupaten yang baru terbentuk sehingga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut masih sangat terbatas. Hal tersebut tentunya dipengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah yang juga terbatas sedang sektor-sektor pembangunan yang harus dibiayai untuk mengejar keteringgalan daerah sangat banyak.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan Satus Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tolikara ini, kami belum dapat menyajikan semua data-data yang diminta sesuai dengan format

yang disediakan, sebagaimana yang kami sudah jelaskan sebelumnya mengingat keterbatasan peralatan yang tersedia oleh karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2007 dan 2008 diarahkan untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium Lingkungan.

Diharapkan dalam penerimaan DAK Lingkungan Hidup tahun 2009 dapat diarahkan pemanfaatannya untuk pengadaan peralatan sehingga penyusunan SLHD dapat dilakukan lebih baik dan sempurna sesuai dengan yang diinginkan.

Demikian SLHD Kabupaten Tolikara ini kami susun semoga dapat menjadi sumber informasi lingkungan Kabupaten Tolikara.

Sekian dan Terima Kasih, **Tuhan Memberkati Kita Sekalian.**

Karubaga, Desember 2008

**BUPATI KABUPATEN TOLIKARA**

**DR. (HC) JHON TABO, MBA.**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A Latar Belakang .....	1
B Maksud Dan Tujuan .....	6
C Visi Dan Misi.....	8
D Gambaran Umum .....	12
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN.....	28
A Strategi Pembangunan .....	28
B Arah Kebijakan Pembangunan.....	29
C Program Prioritas Pembangunan .....	31
BAB III ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN...	33
A Umum .....	33
B Permasalahan Lingkungan di Kawasan Perkotaan.....	36
C Permasalahan Lingkungan Di Kawasan Perdesaan/Kampung.....	38
D Analisis Dan Evaluasi.....	39
BAB IV P E N U T U P.....	60
A Kesimpulan.....	60
B Sasaran.....	60
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Tolikara merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang ditetapkan dengan Undang – undang nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 ). Apabila dilihat dari umur dibentuknya kabupaten ini masih sangat mudah bahkan secara definitifnya dipimpin oleh Bupati dan wakil Bupati hasil Pilkada tahun 2004 saat ini baru memasuki tahun keempat sehingga tentunya kabupaten Tolikara akan berupaya untuk mengejar ketertinggalannya dari kabupaten lain dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam kondisi demikian ini tentunya akan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup apabila dalam aktivitas pembangunan kurang memperhatikan aspek lingkungan dan hanya mengejar pembangunan fisik apalagi dengan kondisi tofografi daerah yang sebagian besar didominasi oleh daerah perbukitan yang mempunyai kelerengan di atas 40% ( $\pm 39,16$  %) dari luas wilayah kabupaten yaitu 14.564 Km<sup>2</sup> (1.456.400 Ha).

Sehubungan dengan itu, maka untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan perlu penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus menjadi sentral dalam penetapan kebijakan pembangunan.

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tolikara merupakan salah satu kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan berwawasan lingkungan. Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan suatu informasi lingkungan, oleh karena itu informasi tentang lingkungan hidup perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan bagi publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

**Camp and Dougherty** (1991) dalam Mitchell (2000) menyebutkan bahwa Inti dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah konservasi yang diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya alam sehingga tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat dicapai.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu upaya terencana untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan optimal bagi kepentingan manusia. Namun pertumbuhan manusia meningkat sangat pesat, tentu saja akan diikuti dengan kebutuhan akan pangan dan energi serta pemukiman yang kesemuanya itu membutuhkan ruang atau tempat, sehingga akan berdampak negatif pada sumberdaya alam dan lingkungan yang akan berakibat pada terjadinya penipisan sumberdaya alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lain yang disebabkan oleh dinamika

penduduk, pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang bijaksana, kurang ter kendalinya IPTEK, terjadinya benturan tata ruang, dan dampak negatif dari kemajuan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk penyelamatan bumi beserta isinya dari bahaya kehancuran akibat kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak efektif dan efisien serta tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut maka **IUCN** (1986) menyusun strategi konservasi yang disesuaikan dengan kondisi alam di Indonesia meliputi:

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan ekosistemnya.
2. Pengawetan keanekaragaman sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya bagi kepentingan umat manusia.
3. Pelestarian di dalam cara-cara pemanfaatan baik jenis maupun ekosistemnya, yaitu dengan mengatur dan mengendalikan cara pemanfaatan sehingga diharapkan dapat diperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (The United Conference on Environment and Development-UNCED) di Rio de Janeiro, 1992, menghasilkan beberapa strategi yang dituangkan dalam Agenda 21, yaitu beberapa deklarasi isu utama lintas sektor

yang saling berkaitan. Salah satu isu penting tersebut dituangkan dalam Bab 40 tentang informasi bagi pengambil keputusan yang menggaris bawahi pentingnya kemampuan pemerintah, baik pada tingkat lokal/daerah, nasional, regional, maupun internasional untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi multisektor dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan analisis data serta penyajian informasi segala aspek lingkungan hidup untuk keperluan pengambilan keputusan sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memasukan unsur konservasi lingkungan ke dalam kerangka proses pembangunan. Kenyataan ini menggarisbawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada tingkat lokal/daerah, nasional, regional, maupun global.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Dalam menginformasikan lingkungan hidup di daerah tersebut terdapat 2 (dua) hal yang perlu disampaikan yaitu **kondisi lingkungan hidup beserta analisis dan kecenderungannya** serta **data tahunan berkala tentang lingkungan hidup, baik primer ataupun sekunder.**



Hal pertama disusun dalam laporan SLHD (sebagai penyempurnaan dari Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah atau NKLD) yang menyertakan isu regional, global dan universal. Isu global dan isu regional membutuhkan aksi di tingkat lokal dan nasional contohnya perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon. Hal kedua disusun dalam Basis Data Lingkungan Hidup Daerah (BDLHD), yang pada tahap awal akan merupakan data dasar bagi keperluan penyusunan laporan SLHD.

Salah satu ciri pokok dalam penyusunan laporan SLHD terletak pada kemampuan menyajikan hubungan antara bio-fisika dengan sosial ekonomi ke dalam bahasa masyarakat umum/awam. Keberhasilan pemanfaatan laporan ini terletak pada meningkatnya pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam turut mengatur, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungannya serta masyarakat ikut berperan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, penyusunan BDLHD didasarkan pada data-data lingkungan hidup yang benar, akurat dan ilmiah. Sedangkan mutu analisis dalam laporan SLHD sangat tergantung pada transformasi data dasar menjadi suatu informasi yang berguna bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sejak 2001, penyusunan laporan NKLD di tingkat pusat telah mulai direpresentasikan ke dalam laporan SLHD dan BDLHD dengan menggunakan metode penyusunan *State of the Environment Report (SoER)* yang dibuat oleh United Nation Environmental Program (UNEP) yang merupakan kriteria umum dari UNEP seperti yang tercantum di bawah ini. Hal tersebut merupakan "standarisasi dan pengaturan" yang bersifat umum dengan tidak menutup kemungkinan pengembangan kreativitas dalam memberikan informasi pendukung lainnya yang disesuaikan dengan keadaan setiap daerah.

Sesuai dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: B-5328 /MENLH/ 10 / 2005 Tanggal 24 Oktober 2006 bahwa penyampaian tersebut dalam bentuk Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Basis Data Lingkungan Daerah dengan menggunakan metode penyusunan *State of The Environment Report (SoER)*. Status Lingkungan Hidup Daerah disusun berdasarkan pada isu utama lingkungan hidup, yang terjadi di Kota Jayapura

## **B. Maksud Dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang kondisi dan keberadaan lingkungan hidup daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup daerah .

## 2. Tujuan

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tolikara tahun 2006 bertujuan:

- a. Menyediakan fondasi yang kuat berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup daerah;
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kepentingan penanaman modal (investor).
- d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di daerah sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- e. Dan secara khusus mengetahui tingkat kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tahun 2006.

### **C. Visi Dan Misi**

#### **1. Visi**

Berdasarkan kondisi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah maka dalam mewujudkan kemajuan pembangunan ke depan ditetapkanlah visi Kabupaten Tolikara sebagai berikut:

**“ NAWI ARIGI”**  
**MEWUJUDKAN LANDASAN PEMBANGUNAN BAGI**  
**WILAYAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN TOLIKARA**  
**YANG DINAMIS, KREATIF DAN SEJAHTERA**  
**MELALUI PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN**  
**YANG BAIK TAHUN 2010**

**NAWI ARIGI** MENGANDUNG MAKNA UNGKAPAN  
**RASA CINTA SESEORANG YANG MENDALAM TERHADAP**  
**KAMPUNG HALAMAN DAN NEGERINYA.**

Pernyataan visi tersebut ditetapkan berdasarkan suatu renungan dan dan pemikiran yang mendalam dari kondisi kemasyarakatan dan perjalanan panjang pengabdian di Kawasan Pegunungan Tengah Papua. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan dengan keluguan yang murni mendorong keterpanggilan untuk membangun daerah ini. Disadari bahwa daerah yang baru berkembang seperti ini

Pemerintah merupakan agen pembangunan yang paling dominan, bahkan mungkin dapat dikatakan satu-satunya agen pembangunan. Karena itu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mau melayani masyarakat dengan tulus dan jujur dengan hati nurani, merupakan modal untuk membangun daerah ini. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan tulus dalam menjalankan tugas merupakan kunci keberhasilan pembangunan dengan karakter alam dan masyarakat seperti di Kabupaten Tolikara.

Penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa dimaksud adalah bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, akan dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), mendorong terciptanya paradigma pemerintah yang melayani bukan dilayani dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada yaitu dana dan pemanfaatan kekayaan alam di Kabupaten ini. Dalam menjalankan roda Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Tolikara akan memberi perhatian secara serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam hal ini aparatur pemerintah pada umumnya dan pejabat di kabupaten ini pada khususnya.

Penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat yang sejahtera dimana masyarakat harus merasakan keberpihakan pemerintah kepada mereka dan sedapat

mungkin mengakomodasi aspirasinya. Masyarakat yang sejahtera sebagaimana dimaksudkan dalam visi ini adalah masyarakat yang dapat tercukupi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan dengan baik. Pemerataan pelayanan dimaksud juga meliputi pelayanan administrasi pemerintahan hingga ke distrik dan kampung termasuk pelayanan perizinan untuk berusaha dan berinvestasi.

Sedang dalam rangka pembangunan sumberdaya masyarakat maka dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong terciptanya suatu masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif. Dalam lima tahun ke depan diharapkan masyarakat Kabupaten Tolikara mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, para pemuda telah mengenal dan dapat menggunakan teknologi informatika untuk membuka wawasan mereka dan mendorong perikehidupan masyarakat yang lebih dinamis.

Oleh karena itu sasaran pembangunan dalam lima tahun ke depan untuk menciptakan masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif, merupakan upaya yang akan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Tolikara periode 2006 – 2010.

## 2. Misi

Misi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Oleh sebab itu akan dijabarkan lebih lanjut pokok-pokok pernyataan visi guna mewujudkan kebutuhan pembangunan dalam rangka pencapaiannya. Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tolikara sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan pemerintahan sampai ke distrik dan kampung dan mengembangkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. Meningkatkan sarana prasarana kewilayahan, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tolikara dan Kawasan di Papua lainnya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan pada semua sektor;
- c. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan teknologi informatika dan komunikasi untuk mendorong dinamisasi, kreatifitas dan inovasi dalam masyarakat terutama generasi muda dan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- e. Mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan dan permukiman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparat pemerintah fungsional di daerah terpencil.

- f. Mendorong dan menciptakan peluang investasi serta sektor swasta dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah untuk menciptakan peluang berusaha dan peluang kerja.
- g. Menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat.

#### **D. Gambaran Umum**

##### **1. Geografi**

###### **a. Posisi / Letak**

Kabupaten secara geografis berada pada posisi 138°00'00"-139°00'00" Bujur Timur dan 3°00'00" - 4°00'00" Lintang Selatan.

###### **b. Batas Administrasi**

Luas Kabupaten Tolikara adalah 14.564 Km<sup>2</sup> (1.456.400 Ha),

terdiri dari 30 Distrik defenitif dan 5 Distri Persiapan yang terbagi terbagi habis menjadi 511 Kampung dan 2 Kelurahan.

Secara Administrasi Kabupaten Tolikara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya.



Berikut ini merupakan gambaran luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Tolikara yang dirinci menurut distrik sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**DATA LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK Kabupaten Tolikara**  
**DIRINCI MENURUT Distrik**

<b>NO.</b>	<b>DISTRIK</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>LUAS WIL. (KM2)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	KARUBAGA	26	1	643.31
2	BOKONDINI	12	1	466.62
3	KANGGIME	17	0	469.27
4	KEMBU	17	0	417.48
5	GOYAGE	19	0	446.48
6	WUNIN	14	0	368.80
7	WINA	13	0	444.41
8	UMAGI	13	0	484.81
9	PANAGA	13	0	506.57
10	WONIKI	21	0	420.60
11	POGANERI	12	0	529.36
12	K U B U	25	0	485.90
13	KONDAGA	17	0	447.52
14	N E L A W I	22	0	511.74
15	K U A R I	18	0	622.60
16	BOKONERI	17	0	472.40
17	KAMBONERI	12	0	528.32
18	B E W A N I	14	0	443.37
19	NABUNAGE	25	0	481.70
20	GILIBANDU	14	0	421.62
21	AIR GARAM	9	0	519.00
22	G E Y A	19	0	478.60
23	N U M B A	17	0	429.91
24	D O W	11	0	466.16
25	WARI/ TAIYEVE II	19	0	667.13
26	D U N D U	14	0	476.52
27	GUNDAGI	17	0	512.26
28	E G I A M	10	0	437.16
29	T I M O R I	14	0	439.17
30	NUNGGAWI	26	0	525.21
<b>TOTAL</b>		<b>511</b>	<b>2</b>	<b>14,564.00</b>

Sumber : Pemerintah Kabupaten Tolikara, Data Wilayah Administrasi, 2006.

### c. Kondisi Topografi wilayah

Wilayah Kabupaten Tolikara mempunyai topografi yang bervariasi antara 1.400 meter sampai 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dimana sebagian besar wilayahnya terdiri pegunungan (dataran tinggi) yang dilalui beberapa aliran sungai dan anak sungai yang berasal dari bukit dan gunung yang ada disekitarnya.

Bila dilihat dari kemiringan lahannya, maka hampir sebagian besar didominasi oleh kemiringan lahan diatas 40 % terutama ditemui di daerah bagian tengah wilayah Kabupaten kearah barat dan timur. Pada bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan sebelah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, kemiringan lahannya bervariasi antara 0% sampai dengan di atas 40%. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.2

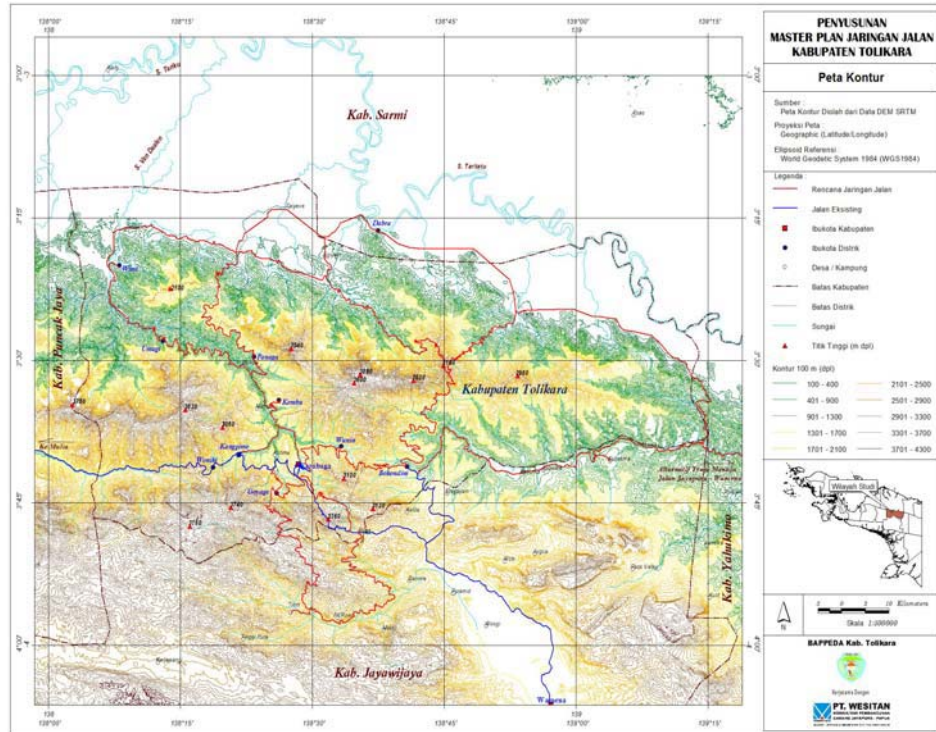
**Tabel 1.2**  
**LUAS PROSENTASE LERENG**  
**DI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2004**

No.	Kelas Lereng	Luas Lereng (Km <sup>2</sup> )	Prosentase(%)
1.	0 -15 %	2.070	14,21
2.	16 – 25 %	4.212	28,92
3.	26 – 40 %	2.579	17,17
4.	> 40 %	5.792	39,16
Jumlah		14.564	100,00

Sumber : Kabupaten Tolikara Dalam Angka 2005.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa prosentase kelerengan di Kabupaten Tolikara sebagian besar > 40 % dalam artian sangat curam yang bersifat konservasi dan lindung.

Gambar : 1.1



#### d. Iklim

Kabupaten Tolikara tergolong beriklim tropis basah dengan suhu minimum 19,4<sup>o</sup> C dan maksimum 26,7<sup>o</sup> C, dengan kecepatan angin rata-rata 3,0 knot dan terendah 2,0 knot serta rata-rata penyinaran matahari rata-rata 58,8%.

**Tabel : 1.3**  
**Suhu Udara di Kabupaten Tolikara Tahun 2005**

<b>No.</b>	<b>B u l a n</b>	<b>Suhu Max (°C)</b>	<b>Suhu Min (°C)</b>	<b>Suhu Rata-Rata (°C)</b>
1.	Januari	26,7	15,2	19,7
2.	Pebruari	26,2	15,5	19,5
3.	Maret	26,5	15,5	19,6
4.	April	26,6	15,9	19,6
5.	Mei	26,9	15,5	19,7
6.	Juni	26,1	15,1	19
7.	Juli	26	14,6	18,3
8.	Agustus	25,9	14,4	18,8
9.	September	26,9	13,9	18,9
10.	Oktober	27,4	14	19,6
11.	November	27,4	15,6	19,9
12.	Desember	27,2	15,1	19,6
	<b>J u m l a h</b>	<b>319,8</b>	<b>180,3</b>	<b>232,2</b>
	<b>Rata - rata</b>	<b>26,7</b>	<b>15</b>	<b>19,4</b>

**e. Musim**

Variasi curah hujan antara 2615,8 mm/th dengan jumlah hari hujan rata-rata bervariasi antara 286 hari hujan / tahun.

Suhu tara-rata 19,4<sup>0</sup> C - 26,7<sup>0</sup> C, musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata- rata 81,91% dan rata-rata penyinaran matahari 58,83% sehingga dengan kondisi demikian sangat menunjang bidang pertanian dan peternakan.

**Tabel : 1.4**  
**Rata-rata Kelembaban Udara dan Lama Penyinaran Matahari**  
**di Kabupaten Tolikata Tahun 2005**

No.	B u l a n	Kelembaban Udara (%)	Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	81,0	56
2.	Pebruari	81,0	59
3.	Maret	81,0	57
4.	April	82,0	53
5.	Mei	83,0	57
6.	Juni	81,0	48
7.	Juli	83,0	66
8.	Aagustus	82,0	69
9.	September	83,0	63
10.	Oktober	82,0	61
11.	November	82,0	56
12.	Desember	82,0	61
	<b>J u m l a h</b>	<b>983,0</b>	<b>706</b>
	<b>Rata - rata</b>	<b>82</b>	<b>58,83</b>

Sumber : Tolikara Dalam Angka 2006

**f. Hidrologi dan Daya Dukung Sumber Daya Air**

Sebagai Kabupaten yang berada pada daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Memberamo dan Baliem serta berada di tengah wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Tolikara merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air dimana arah aliran sungainya mengalir ke bagian utara maupun ke selatan. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah perencanaan adalah : Sungai Toli, Sungai Konda, Sungai Bogo, Sungai Wunin, Sungai Kembu, Sungai Pun, Sungai Kurip, Sungai Kega, Sungai Anggok, Sungai Memberamo. Sungai-sungai tersebut di atas, memiliki jalur sungai yang berkelok

dan banyak memiliki anak sungai, selain itu juga cukup banyak kandungan lumpur dan batuan-batuannya. Sebagian besar Kabupaten Tolikara tidak tergenang, walaupun ada beberapa wilayah terutama pada bagian Timur Laut kabupaten yang masih sedikit tergenang. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan/wilayah studi, dapat dikenali bahwa kondisi sumber air ( air permukaan maupun air tanah dangkal ) cukup baik, sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun terus berair dengan volume yang relatif besar dan kontinyu. Sumber air tersebut dapat di jadikan sebagai sumber air baku untuk pertanian maupun untuk air bersih, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung air cukup berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian.

**g. Daya Dukung Sumber Daya Hutan**

Secara umum kawasan hutan di Kabupaten Tolikara berdasarkan Peta Paduserasi ( Tata Guna Hutan Kesepakatan ) Penataan Ruang Provinsi Papua adalah Hutan Lindung, Hutan Produksi Biasa dan Kawasan Hutan Cagar Alam serta sedikit terdapat Taman Nasional Lorenz. Untuk lebih jelasnya, mengenai daya dukung sumber daya hutan di wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel 1.5

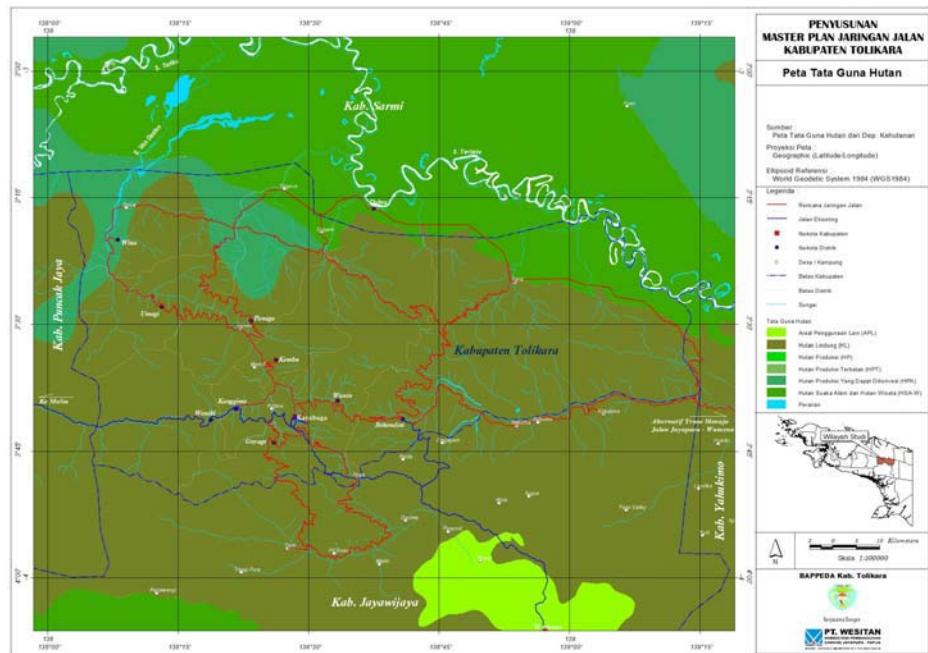
**Tabel 1.5**  
**KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN TOLIKARA (Km<sup>2</sup>) TAHUN 2005**

No.	Nama Distrik	Klasifikasi Hutan					Jumlah (Km <sup>2</sup> )
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Biasa	Hutan Cagar Alam	Taman Nasional	
1	Karubaga	2.172	0	1.169	0	0	3.341
2.	Goyage	*	*	*	*	*	*
3.	Wunin	*	*	*	*	*	*
4.	Kanggime	1.032	46	845	0	113	2.036
5.	Woniki	*	*	*	*	*	*
6.	Kembu	1.172	1.057	0	1.824	0	4.053
7.	Umagi	*	*	*	*	*	*
8.	Wina	*	*	*	*	*	*
9.	Panaga	*	*	*	*	*	*
10.	Bokondini	1.416	0	0	1.159	0	2.575
<b>Jumlah</b>		<b>5.792</b>	<b>1.103</b>	<b>2.014</b>	<b>2.983</b>	<b>113</b>	<b>12.005</b>

Sumber : Peta TGHK Provinsi Papua, Bakorsutanal, 2005.

\* Data masih menginduk dengan Distrik Induk

**Gambar : 1.2**



#### ***h. Jenis Tanah***

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tolikara meliputi 5 jenis, yaitu Podsolik Coklat Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Mediteran Renzina, Podsolik Merah Kuning Renzina, Organosol Alluvial dan Latosol. Adapun pengertian dari masing-masing jenis tanah di wilayah Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

- 1) Podsolik Coklat Kelabu merupakan jenis tanah muda, tapi sudah berkembang lebih dari pada Entisol ( Inceptisol Permulaan ). Umumnya memiliki Horison Cambik, karena jenis tanah ini belum berkembang lebih lanjut maka cenderung lebih subur.
- 2) Podsolik Merah Kuning adalah jenis tanah dimana terjadi penimbunan liat pada horison bagian bawahnya, bersifat masam, kejenuhan basah pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah kurang dari 35 %, sering pula dicirikan dengan reaksi tanah yang masam, kandungan Alumunium yang tinggi dari jumlah unsur hara yang rendah.
- 3) Mediteran Renzina adalah jenis tanah dengan horison penimbunan liat ( horison argilik ) dan kejenuhan basa lebih dari 50 % serta tidak memiliki Horison Albik. Dicitrakan pula dengan adanya Epipedon Molik ( berwarna gelap ) dengan kandungan bahan organik lebih dari 1 %.



- 4) Podsolik Merah Kuning Rensia adalah jenis tanah dimana terjadi penimbunan liat pada horison bagian bawahnya, bersifat masam, kejenuhan basah pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah kurang dari 35 %, dan lapisan bawahnya terdiri atas batuan kapur.
- 5) Latosol adalah jenis tanah dengan kadar liat lebih dari 50 %, remah sampai gumpal, gembur warna tanah seragam dengan batas-batas horison yang kabur, Solum dalam ( lebih dari 150 cm ), kejenuhan basah kurang dari 50 %, umumnya memiliki Epipedon Umbrik dan Horison Cambik. Untuk lebih jelasnya, mengenai jenis tanah dan sebarannya dapat dilihat pada tabel 1.6

**Tabel 1.6**  
**JENIS TANAH DI KABUPATEN TOLIKARA (Km<sup>2</sup>) TAHUN 2005**

No	Nama Distrik	Jenis Tanah					Jumlah (Km <sup>2</sup> )
		Mediteran Rensia	Pods Coklat Kelabu	Pods MK Rensia	Latosol	Pods Merah Kuning	
1.	Karubaga	0	0	1.279	2.986	0	4.265
2.	Goyage	*	*	*	*	*	*
3.	Wunin	*	*	*	*	*	*
4.	Kanggime	0	0	851	1.622	0	2.473
5.	Woniki	*	*	*	*	*	*
6.	Kembu	883	916	1.249	0	1.724	4.772
7.	Umagi	*	*	*	*	*	*
8.	Wina	*	*	*	*	*	*
9.	Panaga	*	*	*	*	*	*
10.	Bokondini	101	0	751	799	1.403	3.054
<b>Jumlah</b>		<b>984</b>	<b>916</b>	<b>4.130</b>	<b>5.404</b>	<b>3.127</b>	<b>14.564</b>

Sumber : Peta TGHK Provinsi Papua, Bakorsutanal, 2005.

\* Data masih mengindik dengan Distrik Induk

### i. Geologi

Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh wilayah Papua memiliki potensi bahan tambang yang cukup tinggi, begitu pula di wilayah Kabupaten Tolikara. Dari segi geologi wilayah Kabupaten Tolikara termasuk kedalam batuan formasi pembawa logam yang terbentuk dari Formasi kelompok batu Gamping Nungni yang banyak mengandung bahan tambang Au (Emas), Cu (Tembaga), dan Ag (Perak), Formasi Warupi yang banyak mengandung bahan Cu (Tembaga) dan formasi batuan Ultramatik. Untuk lebih jelasnya, mengenai geologi dan luasan masing-masing formasi batuan pembentuknya di Kab. Tolikara, dapat dilihat di Tabel 1.7

**Tabel 1.7**  
**GEOLOGI DI KABUPATEN TOLIKARA (Dalam Km<sup>2</sup>)TAHUN 2005**

No.	Nama Distrik	Jenis Formasi Batuan			Jumlah (Km <sup>2</sup> )
		Formasi Kelompok Batu Gamping Nungni	Formasi Warupi	Formasi Batuan Ultramatik	
1.	Karubaga	149	64	853	1.066
2.	Goyage	*	*	*	*
3.	Wunin	*	*	*	*
4.	Kanggime	87	0	25	112
5.	Woniki	*	*	*	*
6.	Kembu	1.527	382	1.432	3.341
7.	Umagi	*	*	*	*
8.	Wina	*	*	*	*
9.	Panaga	*	*	*	*
10.	Bokondini	76	0	840	916
Jumlah		1.839	446	3.150	5.435

Sumber : Direktoral Geologi Bandung, 2005.  
Data masih menginduk dengan Distrik Induk



Taman Nasional Lorenz, sedangkan sisanya diperuntukan untuk perkampungan (pemukiman), ladang dan pertanian. Selain itu penggunaan lahan lainnya masih merupakan padang rumput. Untuk jelasnya, alokasi penggunaan lahan di wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel 1.8 dan Gambar 1.2

**Tabel 1.8**  
**ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2005**

No.	Nama Distrik	Jenis Penggunaan Lahan (Km <sup>2</sup> )							Jumlah (Km <sup>2</sup> )
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>Karubaga</b>	<b>118</b>	<b>28</b>	<b>378</b>	<b>1</b>	<b>3.341</b>	<b>239</b>	<b>160</b>	<b>4.265</b>
2.	<b>Goyage</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
3.	<b>Wunin</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
4.	<b>Kanggime</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>2.037</b>	<b>193</b>	<b>129</b>	<b>2.473</b>
5.	<b>Woniki</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
6.	<b>Kembu</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>4.053</b>	<b>324</b>	<b>216</b>	<b>4.772</b>
7.	<b>Umagi</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
8.	<b>Wina</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
9.	<b>Panaga</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
10.	<b>Bokondini</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>2.575</b>	<b>215</b>	<b>142</b>	<b>3.054</b>
<b>Jumlah</b>		<b>183</b>	<b>36</b>	<b>718</b>	<b>3</b>	<b>12.006</b>	<b>971</b>	<b>647</b>	<b>14.564</b>

Sumber : Kabupaten Tolikara Dalam Angka Tahun 2005

\* Data masih mengindik dengan Distrik Induk

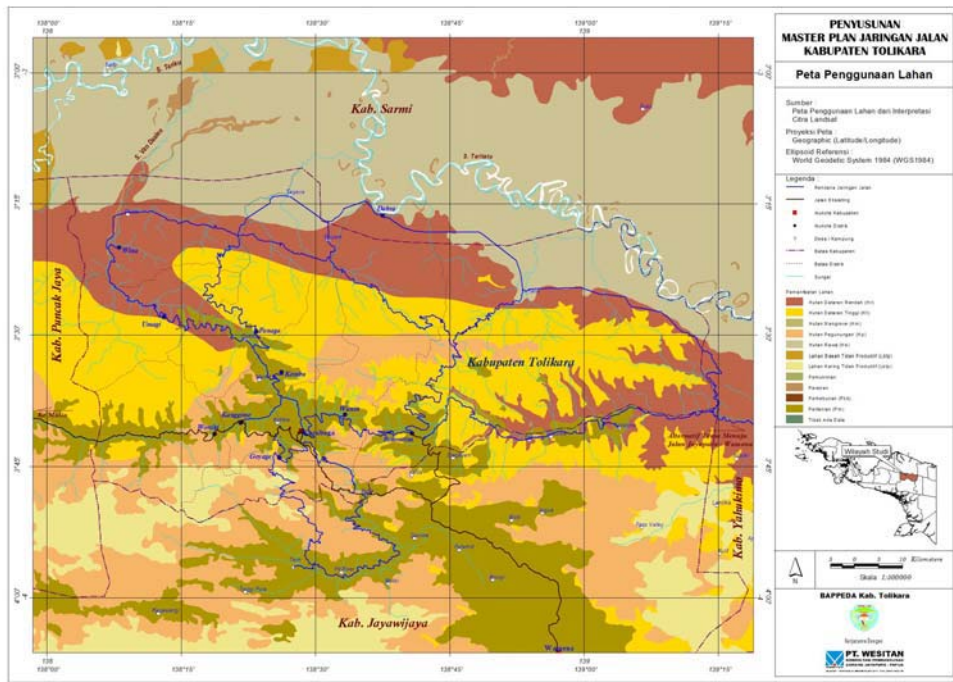
Keterangan :

Jenis Penggunaan Lahan : A = Pemukiman B = Perkebunan C = Palawija

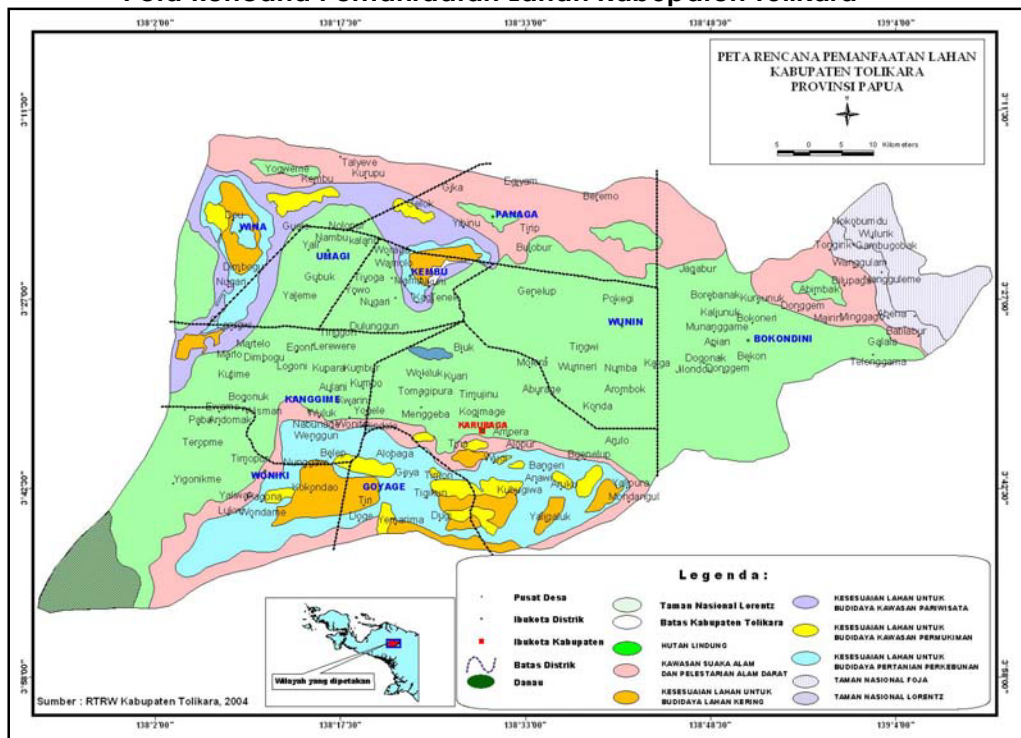
D = Kolam E = Hutan F = Tanah tidak Diusahakan

G = Padang Rumput

Gambar : 1.4



Gambar 1.5  
Peta Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Tolikara



### **i. Karakteristik Sistem Lahan**

Sistem lahan adalah wilayah geografis yang memiliki sifat khas. Sistem lahan dikenali indikator-indikator : faktor ekologi, bentuk lahan, struktur batuan dan tanah, serta iklim. Di wilayah Kabupaten Tolikara terdapat 8 karakteristik sistem lahan. Setiap karakteristik sistem lahan tersebut memiliki karakteristik yang unik sehingga pengidentifikasian potensi dan kesesuaian lahan secara akurat dapat dilakukan. Sistem-sistem lahan yang terdapat di Kabupaten Tolikara didasarkan pada hasil studi report untuk seluruh wilayah Provinsi Papua yang dilakukan pada Tahun 1986 ini akan dijadikan dasar untuk melakukan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan (Lihat Tabel 1.9).

**Tabel 1.9**  
**KARAKTERISTIK SISTEM LAHAN DI KABUPATEN TOLIKARA**

No.	Sistem Lahan	Bentuk Lahan	Kesesuaian Lahan								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<b>ABN</b> <b>(Amban)</b>	<b>Gunung-Gunung Gamping dengan sisa - sisa bergelom-bang</b>	N/S	N	N	N	N	N	N	S	N
2.	<b>BVK</b> <b>(Bivak)</b>	<b>Teras-teras agak di dataran lakustrin di pedalaman yang tertutup</b>	S	S	N	N	S	S	S	S	S
3.	<b>SGM</b> <b>(Sigemera)</b>	<b>Punggung-punggung gunung dan cuesta-cuesta dgn pola yang paralel</b>	N	N	N	N	N	N	N	S	N

4.	STL (Steenkool)	Dataran-dataran berombak hingga bergelombang dgn beberapa lembah yang lebar	S	S	N	N	S	S	S	S	N
5.	STS (Setenis)	Dataran berbukit terdiri dari cuesta-cuesta dan punggung-punggung	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6.	TRT (Taritatu)	Rawa-rawa dengan banyak danau, terjadi genangan pada waktu-waktu tertentu	N	N	N	N	N	N	N	N	S
7.	WKI (Wariki)	Punggung-punggung yang paralel dan tinggi	N	N	N	N	S	S	S	S	N
8.	TMK (Timika)	Dataran kipas-kipas aluvial yang tergabung	S	S	N	N	S	S	S	S	N

Sumber : Hasil studi Reprot 1986 dan Peta Land System Bakosurtanal

**Keeterangan:**

A = PEKARANGAN

B = PERTANIAN LAHAN KERING

C = PERTANIAN LAHAN BASAH (PADI)

D = PERTANIAN LAHAN BASAH

(PADI/PALAWIJA)

E = PERKEBUNAN KELAPA, KELAPASAWIT

DAN BUAH MERAH

F = PERKEBUNAN KOPI,COKLAT

G = PERKEBUNAN HORTIKULTURA

H = SAGU

I = PERIKANAN

N = TIDAK SESUAI

S = SESUAI

N/S = TIDAK SESUAI, TETAPI MEMPUNYAI  
FASET KECIL "SESUAI" DIDALAMNYA

## **BAB II**

# **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN**

### **A. Strategi Pembangunan**

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tolikara, maka ditetapkanlah strategi sebagai cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan, kualitas Aparatur serta sarana dan prasarana pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai ke distrik dan kampung serta mengembangkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance);
- b. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar kewilayahan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tolikara dan Kawasan di Papua serta peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengembangan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. Memadukan dan mensinergikan program/kegiatan pembangunan antar sektor dan antar wilayah secara terarah, terfokus dan rkan skala prioritas;



- f. Mengoptimalkan pola pembiayaan pembangunan secara bersama-sama antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam penyelesaian program dan kegiatan strategis untuk mendorong percepatan pengentasan keteringgalan daerah ;
- g. Mendorong dan menciptakan peluang investasi serta sektor swasta dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah untuk menciptakan peluang berusaha dan peluang kerja,;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat adat, toko agama, toko pemuda dan kaum gender dalam pelaksanaan pembangunan;
- i. Membangun kerjasama antar kabupaten/distrik dalam satu kawasan/wilayah pembangunan yang memiliki hubungan ekonomi dan sosial budaya.

## **B. Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tolikara tahun 2006 meliputi beberapa bidang pembangunan, yaitu: bidang Kesehatan , Pendidikan, Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan, bidang ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, fisik dan prasarana serta pembangunan otonomi daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang kemudian disusul dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain ditetapkannya arah pembangunan tersebut, terdapat pula sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan pembangunan Kabupaten Tolikara saat ini. Sasaran yang dimaksud adalah peningkatan ekonomi yang berpengaruh

terhadap peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk sumber daya aparatur dan masyarakat sebagai penyelenggara dan sasaran pembangunan, karena kondisi dan perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Tolikara secara umum tidak dapat dipisahkan dari peranan masing-masing sektor ekonomi yang ada.

Struktur perekonomian suatu wilayah merupakan salah satu indikator perkembangan wilayah yang bersangkutan. Peranan dari masing-masing sektor perekonomian yang ada dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral dan kontribusi dari masing-masing sektor terhadap pembentukan nilai total PDRB. Semakin besar kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan nilai total PDRB, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.

Adapun arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat sebagai sasaran pembangunan;
2. Peningkatan Pelayanan infrastruktur dasar baik dibidang prasarana kewilayahan, kesehatan dan pendidikan;
3. Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengelolaan potensi sumberdaya alam secara arif dan bijaksana dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup;
5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong investor berinvestasi ke daerah;

6. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan di daerah;
7. Peningkatan penyediaan data base untuk menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

### **C. Program Prioritas Pembangunan**

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut diatas maka dijabarkan kedalam bentuk rencana program pembangunan yang dapat ditindak lanjuti setiap tahunnya sehingga permasalahan yang dihadapi oleh daerah secara bertahap dapat terjawab dan terselesaikan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah serta berdasarkan skala prioritas. Adapun program prioritas Pemerintah Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan kelembagaan daerah dan peningkatan SDM;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
3. Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dasar perkotaan dan Perdesaan pada sektor transportasi, perumahan, air bersih, energi listrik dan telekomunikasi;
4. Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pendidikan;
6. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, industri rumah tangga, perdagangan serta penataan lembaga ekonomi dan keuangan daerah;

7. Program pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam secara arif dan bijaksana;
8. Program Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta Penataan Ruang Daerah;
9. Program pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
10. Program pembinaan sosial kemasyarakatan;
11. Program kemitraan dalam pembangunan daerah melalui kegiatan investasi pihak swasta ;
12. Dan lain-lain program yang dapat mendukung dalam percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

# ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

### A. U m u m

Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan setiap daerah mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Kabupaten Tolikara yang baru terbentuk beberapa tahun yang lalu tentunya tidak ketinggalan untuk memacu pembangunan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada guna mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya yang sudah duluan maju baik dari aspek pembangunan fisiknya maupun dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk mendukung dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan keterbatasan lahan yang ada yang sebagian besar didominasi oleh daerah perbukitan mempunyai tingkat kelerengan yang terjal (>40%) sebesar 39,16 % dari luas wilayah kabupaten Tolikara serta daya dukung lahan yang cukup labil akan menyebabkan dilema bagi Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam pelaksanaan pembangunannya, sebab disatu sisi akan tetap dilakukan aktivitas pembangunan dan dipihak lain akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Dalam kondisi demikian maka perlu adanya upaya yang dilakukan sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak terlalu banyak menimbulkan resiko terhadap lingkungan hidup melainkan lebih banyak memberi dampak positif.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa **lingkungan hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Karenanya, harus dipahami bahwa segala aktivitas pembangunan dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia akan berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Sedangkan **pencemaran lingkungan** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya ke lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga terjadi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang berfungsi atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya.

Mengingat bahwa segala aktivitas manusia akan berlangsung secara terus-menerus, maka untuk menjaga agar ada jaminan keberlanjutan segala aktivitasnya maka perlu diperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Sebab, pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek lingkungan serta sumberdaya alam yang tersedia pada akhirnya, terutama dalam jangka panjang, akan mengalami hambatan yang sangat berarti bahkan suatu saat akan berhenti secara total.

Kabupaten Tolikara mempunyai posisi sangat strategis oleh karena letak Kabupaten Tolikara yang seolah-olah berada pada posisi jantung Provinsi Papua. Bahkan dengan terbentuknya Kabupaten Tolikara ini maka dapat menjadi

daerah penyangga bagi kabupaten lainnya yang ada di Kawasan Pegunungan Tengah namun kondisi tersebut akan terwujud apabila jalur aksesibilitas transportasi darat yang menghubungkan dengan kabupaten lainnya dipegunungan tengah serta jalur transportasi darat Karubaga – Taiyeye telah dibangun.

Dimaklumi bahwa dalam percepatan pembangunan di Kawasan Pegunungan Tengah pasti akan membawa resiko terhadap lingkungan hidup, namun perlu dilakukan secara arif dan bijaksana dengan menerapkan sistem pembangunan yang rama lingkungan sehingga resiko-resiko yang diprediksi akan terjadi dapat diminimalkan seperti penerapan pembangunan dengan pola kontur sehingga dengan demikian tidak akan terlalu banyak merombak bentangan alam.

Untuk maksud tersebut diatas maka akan dilakukan identifikasi isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolikara dengan merujuk kepada Panduan Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007, gambaran Umum Kabupaten Tolikara dan pengamatan di lapangan. Selanjutnya prioritas masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tolikara disusun melalui analisis yang mendalam dari data serta hasil konsultasi dengan instansi-instansi terkait di Kabupaten Tolikara, melalui koordinasi BAPPEDA Kabupaten Tolikara.

## **B. Permasalahan Lingkungan Di Kawasan Perkotaan**

Dengan pesatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kawasan perkotaan berakibat meningkatnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perubahan fungsi kawasan di perkotaan menjadi pemukiman, sarana pemerintahan, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain fasilitas penunjang yang dibangun dalam rangka penataan kota. Dengan adanya aktivitas pembangunan tersebut akan berdampak pada perubahan bentangan alam dimana akan dilakukan cut and fiel pada lahan-lahan yang akan dimanfaatkan. Dalam sistem pembangunan dengan pola cut and fiel ditambah dengan daya dukung lahan yang labil, maka akan memudahkan terjadinya longsor;
2. Kurangnya sistem sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, MCK, drainase dan lain-lain, baik di lingkungan perumahan/permukiman, maupun di lingkungan fasilitas umum;
3. Pencemaran lingkungan oleh kegiatan usaha lain yang berpotensi mencemari lingkungan seperti sektor kesehatan yang berasal dari rumah sakit dan puskesmas berupa limbah infeksius seperti jarum suntik maupun alat lainnya yang tidak disterilkandengan alat steril dimana sistem pemusnahan limbah-limbah yang ada masih bersifat manual dengan membakar dalam drom tanpa menggunakan insenerator dan sektor industri seperti PLTD berupa kebisingan, sisa pembakaran (karbon), oli bekas ;



4. Belum tersedianya TPS maupun TPA untuk pengolahan persampahan baik yang berupa sampah organik dan un-organik rumah tangga;
5. Secara kasat mata tampak masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan;
6. Kurangnya upaya-upaya pengelolaan dan penyehatan lingkungan sebagai akibat terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur dalam pemahaman pengelolaan lingkungan;
7. Sistem pertanian masyarakat yang belum rama lingkungan dimana sebagian besar masih memakai pola pertanian tradisional (berpindah-pindah) dengan membakar areal baru atau hutan apabila pada lahan lama sudah tidak produktif lagi;
8. Adanya perambahan/ penebangan hutan oleh masyarakat untuk pengambilan kayu yang selanjutnya dipasarkan sebagai bahan bangunan;
9. Tingginya tingkat laju erosi akibat luasnya lahan kritis serta aktivitas pada daerah hulu yang tidak terkontrol;
10. Kondisi Permukiman dan perumahan masyarakat yang kurang layak huni (berupa honai-honai) rumah dalam bentuk honai ini kurang bagus dalam sirkulasi udaranya karena tidak mempunyai jendela serta penyinaran matahari maupun cahaya sangat kecil, sehingga rumah model honai ini terkesan pengap dan lembab.



### **C. Permasalahan Lingkungan Di Kawasan Perdesaan/ Kampung**

Permasalahan atau isu lingkungan hidup yang sangat menonjol untuk kawasan perdesaan/ kampung di Kabupaten Tolikara sebetulnya belum terlalu banyak karena pada umumnya pola hidup masyarakat masih bersifat alami. Adapun permasalahan lingkungan hidup yang menonjol untuk kawasan perdesaan/ kampung di Kabupaten Tolikara sebagai berikut :

1. Permasalahan sanitasi lingkungan dimana umumnya pada kawasan-kawasan permukiman belum tersedia prasarana penunjang lingkungan seperti MCK maupun drainase-drainase lingkungan serta peyediaan air bersih;
2. Sistem pertanian masyarakat yang belum rama lingkungan dimana sebagian besar masih memakai pola pertanian tradisional (berpindah-pindah) dengan membakar areal baru atau hutan apabila pada lahan lama sudah tidak produktif lagi;
3. Pembangunan infrastruktur jalan yang direncanakan menghubungkan antar distrik sehingga akan berdampak pada hilangnya vegetasi flora dan kemungkinan akan terjadi migrasi satwa serta bahaya longgsor apabila tidak dikelola dan direncanakan dengan baik. Selain itu dengan terbukanya akses darat yang melintasi kawasan hutan diprediksi akan membuka peluang untuk terjadinya kemudahan dalam perambahan/ penebangan hutan apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap hutan secara ketat.

4. Kondisi Permukiman dan perumahan masyarakat yang kurang layak huni (berupa honai-honai) rumah dalam bentuk honai ini kurang bagus dalam sirkulasi udaranya karena tidak mempunyai jendela serta penyinaran matahari maupun cahaya sangat kecil, sehingga rumah model honai ini terkesan pengap dan lembab.

## D. Analisis Dan Evaluasi

### 1. Isu Perubahan Fungsi Kawasan

#### Jenis Perubahan Fungsi Kawasan

Masalah perubahan fungsi kawasan ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi peruntukan dan pemanfaatan ruang.

Dengan adanya kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran sedang ketersediaan lahan yang layak untuk kegiatan pembangunan sangat terbatas

akan berdampak pada terjadinya perubahan fungsi kawasan yang semula merupakan kawasan terbuka hijau atau areal konservasi beralih fungsi pemanfaatannya menjadi kawasan Budidaya.

Hal tersebut terjadi karena kurang antisipasi dalam penyiapan dokumen teknis penataan ruang serta belum adanya pengendalian dalam pemanfaatan ruang dimana sampai sekarang belum ada proses perijinan untuk kegiatan pembangunan karena belum didukung dengan



perda perijinan serta dokumen tata ruang yang sudah ada belum diperdakan dan baru direncanakan untuk proses perdanya dalam tahun 2009 untuk RTRW Kabupaten Tolikara dan RTBL Kawasan Kota Karubaga. Namun dengan memperhatikan terhadap kondisi yang ada saat ini belumlah terlalu terlambat apabila kita ingin memulai dari sekarang untuk menata pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat dengan konsisten terhadap fungsi pemanfaatan/ peruntukan ruang yang telah direncanakan dalam RTBL kota sehingga dengan demikian penyimpangan atau perubahan fungsi ruang dapat diminimalkan.

Selain itu pesatnya pembangunan yang dilaksanakan saat ini tentu akan berpengaruh pula terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk kota baik bagi mereka yang berniat untuk mencari pekerjaan maupun bagi yang ingin berusaha pada sektor perdagangan. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk kota ini akan berdampak pada kebutuhan ruang/ lahan untuk perumahan maupun untuk tempat usaha. Peningkatan pertumbuhan penduduk kota Karubaga ini dapat dilihat dari data Tolikara Dalam Angka tahun 2004 jumlah penduduk sebanyak 12.226 jiwa, tahun 2005 jumlah penduduk 16.415 jiwa (meningkat 34,26 % atau 4.189 jiwa), tahun 2006 jumlah penduduk 12.316 (menurun 24,97 % atau 4.099 jiwa) dan tahun 2007 jumlah penduduk kota Karubaga menjadi 12.990 jiwa atau meningkat 5.47 % dari tahun 2006. Terjadinya penurunan jumlah penduduk kota

Karubaga pada tahun 2006 tersebut karena adanya pemekaran distrik Karubaga sehingga pendudukpun ikut terpecah kedalam distrik pemekaran, sehingga dengan demikian sebetulnya tidak terjadi penurunan pertumbuhan penduduk melainkan terjadi distribusi penduduk karena adanya pemekaran distrik.

Dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tersebut di atas tentunya akan sangat berdampak terhadap pemanfaatan ruang yang sangat terbatas dimana sesuai dengan RTBL Kota Karubaga Yang disusun tahun 2006 bahwa luas kawasan yang layak untuk budidaya hanya 248,55 Ha dari total luas lahan perkotaan 431,17 Ha sedang untuk non budidaya sebesar 177,18 Ha. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk tahun 2006 dengan luas lahan yang layak untuk budidaya maka kepadatan penduduk pada kawasan perkotaan telah mencapai  $\pm 50$  jiwa/Ha. Apabila hal tersebut tidak diatasi permasalahannya dari sekarang maka secara otomatis akan terjadi intervensi pemanfaatan ruang dari kawasan non budidaya beralih fungsi menjadi kawasan budidaya.

Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi peralihan fungsi pemanfaatan ruang tersebut adalah :

1. Mengalihkan sebagian aktivitas pembangunan pada wilayah-wilayah pengembangan sehingga tidak terjadi konsentrasi penduduk hanya pada pusat kota Karubaga;
2. Secara bertahap mempersiapkan infrastruktur pada kawasan pengembangan (Kawasan Taiyeve) sehingga secara bertahap pula akan terjadi pengalihan sebagian

- aktivitas penduduk kewilayah pengembangan tersebut ;
3. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah pengembangan dan distrik-distrik lainnya sehingga dengan cara pembangunan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
  4. Penetapan Perda Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Karubaga sehingga dokumen yang telah disusun mempunyai kekuatan hukum untuk dipedomani dalam pelaksanaannya;
  5. Menetapkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tolikara yang bertugas melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi-fungsi peruntukan ruang yang sudah ditetapkan;
  6. Dan lain-lain upaya yang dapat dilakukan penduduk tidak hanya terkonsentrasi hanya pada satu titik saja.

## **2. Isu Persampahan**

### **Jenis Sampah**

Masalah kebersihan khususnya sampah terjadi di negara manapun di dunia ini. Masalah sampah sangat terkait dengan populasi penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk biasanya diiringi dengan semakin meningkatnya jumlah sampah. Berdasarkan sumbernya sampah dibagi atas limbah industri dan limbah domestik. Di negara maju dengan tingkat kemajuan teknologi serta tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang sudah relatif tinggi, masalah sampah sudah dapat diatasi. Namun tidak demikian di negara berkembang dimana

jumlah penduduk sangat padat disertai dengan tingkat kesejahteraan rendah, sampah masih menjadi masalah yang rumit dan sulit diatasi.

Sampah (limbah) didefinisikan sebagai hasil sampingan dari proses produksi termasuk kegiatan manusia. Limbah dibagi atas limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Limbah berbahaya biasanya dideskripsikan sebagai limbah yang tidak dapat diuraikan kembali oleh karena itu menjadi sangat berbahaya karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Limbah berbahaya ini kemudian diistilahkan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau juga biasa diistilahkan sebagai sampah anorganik.

Sementara limbah/sampah tidak berbahaya digambarkan sebagai limbah yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme untuk kemudian dapat digunakan kembali dalam proses biokimia baik oleh tanaman maupun tumbuhan. Sampah sejenis ini biasanya diistilahkan sebagai sampah organik.

Dalam jumlah kecil, sampah masih dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak mencemari lingkungan. Sebaliknya dalam jumlah besar, sampah tidak dapat lagi diuraikan oleh jasad renik sehingga jumlah sampah terus menumpuk hingga pada akhirnya menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar.

Sesungguhnya dapat dijelaskan bahwa sebagian besar sampah yang ada di Kabupaten Tolikara bisa diolah di rumah sehingga hanya sedikit yang harus dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sekitar 70 - 80% sampah

rumah tangga merupakan sampah organik yang mudah busuk, ±15% sampah anorganik seperti botol, kaleng, kertas, plastik, dan kain serta 5% limbah B3 seperti baterai dan tabung spray. Karena itu kalau sistem pengolahan sampah dengan prinsip 4 R (rethink, reduce, reuse, recycle) diterapkan, mestinya problem sampah yang menimpa kota-kota besar di Indonesia tidak perlu terjadi.

Pasalnya, sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sebagian sampah anorganik bisa diberikan kepada pemulung untuk didaur ulang atau dibuat kerajinan. Dengan demikian tinggal sepertiga yang perlu dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sebelum dikirim ke TPA, sehingga biaya pengangkutan dan pengolahannya bisa dikurangi dan lahan TPA tak perlu terlalu luas.

Sistem 4R bukan baru. Hanya tak ada kota yang serius menerapkannya. Inti sistem ini adalah mengurangi sampah sejak dari rumah. Untuk itu sampah dipilah dengan membuat kantong berbeda untuk setiap jenisnya: kantong organik untuk sampah organik dan kantong anorganik untuk sampah anorganik. Agar lebih mudah dalam hal operasional, menurut Lya M. Taufik, peneliti bidang teknologi dan manajemen lingkungan Puslitbangkim, Departemen PU, kantong sampah organik sebaiknya berwarna gelap, sedangkan kantong sampah anorganik berwarna terang.

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di kabupaten Tolikara dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini pengolahan sampah masih dilakukan secara tradisional



yaitu dengan sistem pembakaran dan ada sebagian yang dibuang. Kondisi ini terjadi karena belum tersedianya TPA dan TPS bahkan instansi yang menangani masalah persampahan belum terbentuk. Apabila dikaitkan dengan lingkungan hidup maka pola yang dilakukan tersebut sebetulnya belum sesuai dengan upaya pelestarian lingkungan hidup oleh karena dengan sistem pembakaran tersebut akan tetap terjadi pencemaran pada udara ataupun sampah yang dibuang walaupun ada sebagian yang dapat terurai karena pembusukan namun hal tersebut akan tetap mencemari lingkungan karena menimbulkan bau yang tidak sedap, serta ada pula sampah-sampah yang tidak dapat terurai seperti sampah anorganik.

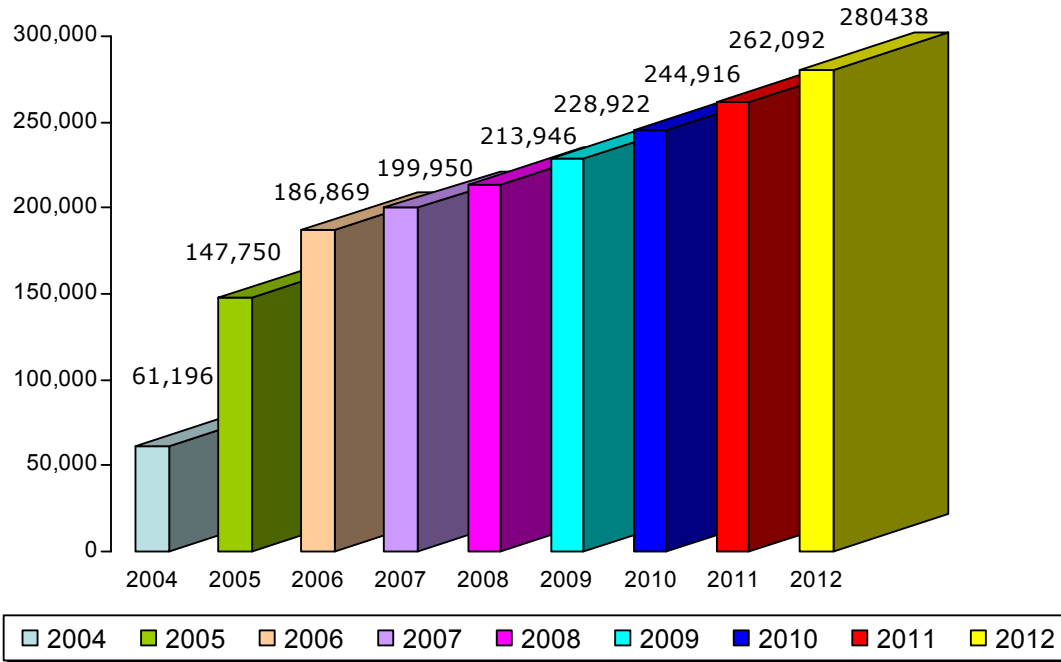
Mungkin dalam kondisi saat ini sampah di Kabupaten Tolikara belum menjadi permasalahan karena volumenya masih terbatas, namun kedepan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan turut berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah, sehingga apabila tidak diantisipasi dari sekarang maka dapat diprediksi bahwa suatu ketika sampah akan menjadi permasalahan yang rumit sama seperti kota-kota lainnya di Indonesia.

### **Jumlah Penduduk dan Volume Sampah**

Peningkatan jumlah penduduk dan pola hidup sangat berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Kabupaten Tolikara secara administrasi saat ini terdiri dari 30 Distrik. Berdasarkan data tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Tolikara 61.196 jiwa yang terbagi dalam 10 Distrik, tahun 2005 jumlah penduduk 147.750 jiwa dan tahun

2006 jumlah penduduk 186.869 jiwa.

**Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tolikara 3 Tahun Terakhir & Proyeksi Sampai Dengan Tahun 2012**



Apabila memperhatikan pada grafik tersebut diatas nampak bahwa pertumbuhan penduduk dikabupaten Tolikara ini sangat tinggi, hal mana disebabkan karena kabupaten Tolikara merupakan Kabupaten yang baru terbentuk beberapa tahun yang lalu sehingga dengan kondisi tersebut tentunya akan diikuti dengan aktivitas pembangunan yang sangat pesat untuk mengejar keteringgalannya untuk mensejajarkan diri dengan kabupaten lain yang sudah lebih duluan maju berkembang. Jadi tingginya pertumbuhan penduduk penduduk tersebut adalah diakibatkan adanya migrasi penduduk baik dari kabupaten lain di provinsi Papua maupun yang datang dari luar provinsi Papua dengan maksud mencari kerja atau melakukan usaha lainnya.

Peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi tersebut akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi sampah. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula produksi sampah yang dihasilkan. Apabila dari sekarang tidak dipikirkan untuk pengolahan sampah maka persampahan ini akan merupakan masalah baru lagi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara ke depan. Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Tolikara dan data volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tolikara, maka perlu diproyeksikan volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tolikara dengan estimasi laju pertumbuhan penduduk rata-rata 7% pertahun sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk	Volume Sampah (M3)				
		Produksi	Rerata/Hr	Dibakar	Sisa	%
2004	61,196	33.504,8	91,79	23.453,4	10.051,4	30.00
2005	147.750	80.893,1	221,62	56.625,7	24.267,4	30.00
2006	186.869	102.777,9	282,58	72.080,8	30.697,2	30.00
2007	199.950	109.972,5	301,29	76.980,7	32.991,7	30.00
2008	213.946	117.670,3	322,38	82.369,2	35.301,1	30.00
2009	228.922	125.907,1	344,95	88.134,9	37.772,1	30.00
2010	244.946	134.720,3	369,09	94.304,2	40.416,1	30.00
2011	262.092	144.150,6	394,93	100.905,4	43.245,2	30.00
2012	280.438	154.240,9	422,57	107.968,6	46.236,3	30.00

(Data: BAPPEDA Kab. Tolikara Tahun 2006 dalam Pengamatan Buangan Sampah Harian)

Dari grafik di atas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Tolikara terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas pembangunan yang berkembang cukup pesat serta tersedianya potensi daerah cukup besar untuk dikelola.

Jika diasumsikan setiap orang per hari menghasilkan sampah sejumlah 1,5 liter, maka jumlah sampah setiap harinya adalah  $\pm 299.925$  lt/hr liter atau  $299,93\text{m}^3/\text{hari}$ . Sementara yang mampu dibakar oleh setiap harinya  $\pm 70\%$  atau  $209,95 \text{ M}^3/\text{Hr}$  sedang yang sisa atau terbuang  $89,98 \text{ m}^3/\text{hr}$ . Sisa sampah terbuang ini diasumsikan sampah-sampah yang tidak bisa terbakar seperti kaleng-kalengan atau sejenisnya.

**Tabel 3.1**  
**Hubungan jumlah penduduk dan produksi sampah di Kabupaten Tolikara Periode 2004-2012**

Tahun	Jumlah Penddk	Produk Sampah (liter)	Pertumbuhan Penduduk (org/tahun)	Pertumbuhan Pddk (%)	Pertumbuhan Sampah (liter)	Pertumbuhan Sampah (%)
2004	61,196	301,910	86.554	141.00	47.388,3	141,43
2005	147.750	341,502	39.119	26,47	21.884,8	26,47
2006	186.869	487,860	13.081	7.00	7.194,6	7,00
2007	199.950	696,943	13.996	6.99	7.697,8	6,99
2008	213.946	995,633	14.976	6.99	8.236,8	6,99
2009	228.922	1,065,327	16.024	6.99	8.813,2	6,99
2010	244.946	1,139,899	17.146	6.99	9.430,3	6,99
2011	262.092	1,219,691	18.346	6.99	10.090,3	6,991
2012	280.438	1,305,069				

**Sumber: BAPPEDA Kab. Tolikara (setelah diolah)**

Kondisi di atas menggambarkan bahwa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka sampah yang dihasilkan pun akan semakin bertambah. Idealnya mulai dari sekarang Pemerintah Kabupaten Tolikara sudah mulai memikirkan terhadap pengolahan sampah baik untuk sarana dan prasarana maupun instansi yang akan menangani masalah persampahan tersebut sehingga kedepan masalah persampahan ini tidak menjadi masalah yang rumit untuk diatasi.

### **Sarana dan Prasarana Kebersihan**

#### **Sarana Pewadahan**

Jenis pewadahan yang terdapat di Kabupaten Tolikara saat ini adalah berupa tong-tong sampah yang terbuat dari drom bekas dan sekaligus sebagai tempat pembakaran sampah. Namun tong-tong sampah tersebut belumlah merata disetiap tempat/ perumahan sehingga ada yang membuang sampah pada tempat-tempat terbuka atau pada tebing-tebing.

Kondisi seperti ini khususnya sampah yang terbang pada tempat-tempat terbuka ini yang merupakan permasalahan oleh karena tidak semua sampah yang terbang tersebut bisa terurai setelah mengalami pembusukan khususnya sampah anorganik.

### **Masalah/Kendala Pengelolaan Sampah**

Pada dasarnya ada beberapa masalah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tolikara yaitu:

1. Secara institusional belum terbentuk lembaga yang akan mengkoordinir penelolaan sampah yang ada di Kabupaten Tolikara;
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai untuk pengelolaan sampah baik berupa TPS maupun TPA;
3. Sampah-sampah banyak yang dibuang ditempat-tempat terbuka sehingga akan mencemari lingkungan;
4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat terbatas;

Dari masalah tersebut diatas, maka solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan persampahan di Kabupaten Tolikara adalah :

1. Membentuk institusi yang akan menangani masalah persampahan palin tidak dengan membentuk UPTD;
2. Melakukan Sosialisasi dan pelatihan pada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk (komposting) dan lain-lain;
3. Membangun sarana dan prasarana persampahan sebagai media untuk tempat pembuangan sampah;

### 3. Isu Limba PLTD Pemda

Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya apabila tidak dikelola dengan baik. Misalnya, kebisingan dan polusi udara serta pencemaran air dan tanah.

Sisa pembakaran berupa gas karbon di lepas ke udara melalui knalpot diesel dan akan menyebabkan pencemaran terjadinya udara. Demikian halnya dengan

limbah cair, berupa oli bekas yang dibuang secara langsung ke drainase atau tumpahkan ke permukaan



tanah akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan seperti sungai maupun terhadap air tanah serta akan menurunkan kesuburan tanah.

Permasalahan utama bahwa sebagian masyarakat



lokal mengkonsumsi air tanah bahkan ada yang mengambil langsung dari badan sungai sehingga pengelolaan diesel ini perlu dilakukan dengan baik

khususnya terhadap limbah buangan walaupun limbah buangan tersebut volumenya kecil  $\pm 20\text{lt/bln}$ , karena selain dampaknya terhadap manusia juga akan berdampak pada biota perairan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan petugas yang mengoperasikan Diesel Pemda tentang pengelolaan oli bekas ternyata bahwa oli bekas dari diesel tersebut ditampung dalam drum dan dijual kepada masyarakat untuk kebutuhan operasional (minyak pelumas) **sensor**.

Namun demikian untuk pengamanan lingkungan maka pemerintah tetap berkewajiban melakukan pengawasan sehingga limbah buangan tersebut betul-betul diamankan supaya limbah buangan tersebut tidak dibuang ke saluran umum maupun kepermukaan tanah sehingga tidak terjadi pencemaran.

#### 4. Isu Limba Rumah Sakit dan Puskesmas Plus

Fungsi utama Rumah Sakit adalah sebagai sarana untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi Rumah Sakit dapat juga menjadi sumber dampak bagi pencemaran lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik terhadap limbah –limbah yang dihasilkannya.

Rumah Sakit yang ada di kabupaten Tolikara





sekarang ini merupakan rumah sakit yang dibangun oleh misi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum kabupaten Tolikara ini dibentuk dan setelah terbentuknya kabu-paten, maka rumah sakit ini dikelola oleh Pemerintah daerah.

Untuk operasi besar pada rumah sakit ini belum dapat dilakukan karena peralatan belum lengkap maupun dokternya sedang yang dapat dilakukan hanya



**PUSKESMAS PLUS**

bedah ringan, persalinan, rawat inap, injeksi/ suntik dan pelayanan pasien berobat jalan sedang yang sifatnya berat dirujuk ke RSUD Jayapura.

Demikianpun dengan laboratoriumnya belum difungsikan karena karena peralatan yang belum lengkap sedang yang dapat diuji di Lab baru berupa test sample malaria.

Namun demikian bukan berarti bahwa Rumah Sakit ini dalam operasionalnya tidak menghasilkan limbah, karena



**TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT**

limbah rumah sakit tidak hanya dari kegiatan operasi maupun laboratorium tetapi dari kegiatan rutin pelayanan sehari-hari rumah sakit dalam

memberikan pelayanan kepada pasien baik yang berobat jalan maupun rawat inap serta pertolongan bagi ibu-ibu melahirkan.

Limbah dimaksud dapat berupa bekas jarum suntik, bekas pisau bedah/ serum, bekas infus, botol-botol kemasan obat-obatan, kain bekas pembalut luka dan lain-lain limbah yang dihasilkan. Sistem pengelolaan limbah yang dilakukan saat ini adalah dengan cara pembakaran pada lobang yang digali dalam tanah sedang limbah yang tidak bisa terbakar dengan api seperti bekas jarum suntik ditanam/ ditimbun dalam tanah. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit GIDI yang ada belum memiliki insenerator maupun IPAL untuk pengolahan limbahnya.

Apabila memperhatikan sistem pengolahan limbah Rumah Sakit yang dilakukan saat ini dinilai belum optimal walaupun telah ada upaya yang dilakukan. Oleh sebab itu maka sistem pengolahan limbah Rumah Sakit ini perlu ditingkatkan karena diketahui bahwa ada bakteri yang tidak dapat dimusnakan pada suhu 100°C (limbah Infeksius) sehingga harus dimusnakan dengan memakai incenerator, selain itu yang berupa limbah cair tidak mungkin diolah dengan sistem pembakaran dalam lubang yang disiapkan. Apalagi dengan cara menimbun bekas jarum suntik merupakan suatu kesalahan yang fatal karena dengan menimbun limbah tersebut bukan berarti virus atau bakteri yang melekat pada bekas jarum suntik tersebut sudah dapat dimusnakan bahkan mungkin bisa berubah menjadi media untuk penuraran virus apabila lokasi tempat penimbunan tersebut tidak aman dari jangkauan manusia.

Sehubungan dengan itu maka untuk pengolahan limbah pada Rumah Sakit ini perlu segera ditindak lanjuti dengan melengkapi sarana dan prasarana pengolahan limbah yang kapasitasnya disesuaikan dengan prediksi limbah yang dihasilkan dari operasional Rumah Sakit sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup.

## 5. Isu Erosi dan Pendangkalan Sungai

Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tolikara relatif kecil diseperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Sungai	Luas DAS (Km <sup>2</sup> )	Panjang (Km)	Kemiringan
1.	Konda	0,61	0,935	0,0856
2.	Kurage	29,655	6,590	0,0983
3.	Tina	15,32	2,400	0,1084
4.	Goyage	24,05	3,700	0,3206
5.	Toli	40,162	4,670	0,1274
6.	Berenggaime	33,809	5,453	0,1704
7.	Kali Poga	23,770	2,764	0,1325
8.	Kali Goa	11,469	1,835	0,2373
9.	Wunin	11,896	3,215	0,2432
10.	Kruku	19,285	3,325	0,2175
11.	Taria	27892	5,241	0,1716
12.	Kali Merah	22,937	3,142	0,1723
13.	Kali Nambu	20,997	2,763	0,3142
14.	Souw	20,737	2,765	0,0956
15.	Priji	26,355	3,214	0,0959
16.	Dan lain-lain			

(sumber: Laporan Akhir Master Plan Jaringan Jalan Kabupaten Tolikara, 2006)

Kabupaten Tolikara mempunyai morfologi perbukitan dengan tegakan vegetasi yang relatif rusak (lahan Kritis)



menyebabkan proses penyimpanan aliran air khususnya pada saat hujan tidak dapat menyerap air dengan baik.

Laju aliran air hujan tertuju pada daerah – daerah yang lebih rendah, seperti sungai.

Sedangkan morfologi sungai – sungai yang ada di Kabupaten Tolikara sendiri menunjukkan menurunnya kapasitas daya dukung sungai sudah tidak mendukung sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. tidak terpeliharanya daerah aliran sungai dimana sebagian besar DAS merupakan daerah lereng yang sudah kritis sehingga mudah sekali terjadi pengikisan/ erosi dan longsor yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi pada daerah aliran yang landai dan pada daerah hilir;



2. Proses erosi dan sedimentasi sungai terus berlangsung.
3. Rusaknya hutan di hulu sungai mengakibatkan tanah akan ikut terbawa sampai di bagian hilir.
4. Adanya aktivitas perkebunan tanaman jangka pendek masyarakat pada daerah-daerah hulu dan daerah lereng sehingga sangat memudahkan terjadinya proses erosi.

Kondisi di lapangan tersebut diatas menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap pemeliharaan sungai dan hutan bahkan diikuti dengan adanya aktivitas



dengan adanya berbagai aktivitas dari hulu sampai ke hilir



yang semakin mempercepat terjadinya laju degradasi lahan dan pada akhirnya dampaknya akan berbalik kepada kita semua.

Di mana-mana terjadi pembukaan lahan dengan tidak memperdulikan kriteria **kawasan lindung** dan sistem pertanian yang tidak memenuhi kaidah konservasi. Semua aktivitas ini meningkatkan erosi dan memicu terjadinya longsor dan sekaligus mempercepat **sedimentasi** di tempat-tempat yang lebih rendah, terutama di sungai-sungai.

Selain itu dampak yang akan dirasakan kemudian bahwa suatu saat akan terjadi kekurangan air atau kekeringan pada musim kemarau dan bahaya banjir, erosi dan longsor



pada musim hujan. Hal tersebut akan terjadi pada saat hutan yang berfungsi untuk mengatur tata guna air tanah



serta menahan laju erosi telah habis ditebang.

Sehubungan dengan itu maka upaya penyelesaian permasalahan tersebut diatas yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan Sosialisasi pada masyarakat;
2. Pengamanan kawasan hutan;
3. Pengamanan Daerah Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Menerapkan pola pertanian sistem konservasi khususnya pada daerah lereng ;
5. Rehabilitasi lahan kritis dan daerah tangkapan/ catsmen area;

6. Menerapkan sistem pembangunan dengan pola kontur sehingga tidak banyak merusak lingkungan serta efisiensi dalam pembiayaan khususnya biaya cat and fiel dan untuk bangunan penunjang seperti talud maupun bronjong atau turap.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk penyajian tentang informasi lingkungan hidup, sehingga dengan adanya dokumen ini dapat menjadi bahan acuan untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Dalam penyajian data SLHD Kabupaten Tolikara tahun 2008 ini memang belum lengkap karena keterbatasan peralatan serta ketersediaan dana yang juga terbatas maupun kondisi medan daerah yang sangat sulit, namun Pemerintah daerah Kabupaten Tolikara akan selalu berupaya untuk berbuat yang lebih baik lagi sehingga data dan informasi lingkungan lebih mendekati ketinggian kesempurnaan.

#### **B. Saran-saran**

Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Tolikara menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, maka diharapkan adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk membiayai kerusakan lingkungan hidup daerah dimana telah dijelaskan bahwa sebagian wilayah daerah didominasi oleh daerah perbukitan dan



pegunungan yang memiliki tingkat keterenggan diatas 40% yang hampir 60% didominasi oleh lahan kritis, sehingga dengan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah dan berakibat pada bahaya erosi dan longsor;

2. Demikianpun dalam hal ketersediaan peralatan untuk melakukan uji sampel terhadap kualitas air maupun udara juga sangat terbatas;
3. Untuk pengolahan sampah dan limbah juga sampai saat ini belum tersedia sehingga pengolahan sampah dilakukan secara manual (sistem pembakara) sedang untuk limbah baik padat maupun cair belum dilakukan pengolahan sehingga hal tersebut apabila dibiarkan maka akan berdampak terhadap lingkungan baik itu terhadap manusia maupun terhadap makluk hidup lainnya.

Demikian dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tolikara disusun kiranya mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat maupun siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap Lingkungan Hidup, karena lingkungan ini bukanlah milik kita pribadi akan tetapi merupakan warisan untuk anak cucu pada masa yang akan datang sehingga kelestarian lingkungan hidup ini perlu dilestarikan dan diamankan.

Karubaga, Desember 2008

**BUPATI TOLIKARA**

**DR (HC) JOHN TABO, MBA.**